



LURAH BANTUL
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN BANTUL
NOMOR 1 TAHUN 2022

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6485);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 1129);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1261);
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Seri D Nomor 07 Tahun 2009);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pemberian Jaminan Hidup kepada Keluarga Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Keluarga Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pelaku Perjalanan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 40);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Kalurahan di Bantul Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 1158);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);

19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
21. Peraturan Desa Bantul Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Bantul Tahun 2019 Nomor 05);
22. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2020 Nomor 1);
23. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP- Kal) Kalurahan Bantul Tahun 2021 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Bantul Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bantul Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2724/PRI.00/X/2020;
 2. Keputusan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Bantul;
 3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 210 Tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Bantul;
 4. Keputusan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2021 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa Tahun Anggaran 2021;
 5. Keputusan Bupati Bantul Nomor 256 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 9 Tahun 2021 tentang Daftar Kalurahan, Lokasi, dan Alokasi Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANTUL

dan

LURAH BANTUL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2021

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran
2021 dengan rincian sebagai berikut :

(1) Realisasi Pendapatan Kal T.A 2021 sebesar	Rp	3.697.197.522,-
(2) Realisasi Belanja Kal T.A 2021 sebesar		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kal	Rp	1.862.762.370,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kal	Rp	2.874.828.890,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	247.760.145,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	198.308.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat	Rp	21.600.000,-
Jumlah Belanja Kal	Rp	5.205.259.405,-
Surplus (1)-(2) sebesar	(Rp)	1.508.061.883,-
(3) Pembiayaan Kal		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	2.097.841.723,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	1.997.841.723,-
Sisa lebih/ (kurang) perhitungan anggaran (1)+(3)-(2)	Rp	489.779.840,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan
sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan
Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Kalurahan Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Maret 2022



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 31 Maret 2022

CARIK BANTUL,

A blue ink signature, likely belonging to Retna Handayani, is written over a circular official stamp. The signature is stylized and written in blue ink.

RETNA HANDAYANI

LEMBARAN KALURAHAN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR.1..
NOREG PERATURAN KALURAHAN BANTUL, KAPANEWON BANTUL
KABUPATEN BANTUL : (..1../KALURAHAN BANTUL/2022)